



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BALI**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA I
JL. DR. KUSUMAATMADJA NITI MANDALA RENON DENPASAR 80235
TELEPON (0361) 235051, 225292 FAKSIMILE (0361) 222844 E-MAIL:KANWIL20.BUN@KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-465/WPB.22/2020 20 Maret 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Pengaturan Penyampaian Usul Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan TA 2020

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja

Lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-246/PB/2020 hal pada pokok surat dan dalam rangkaantisipasi penyebaran COVID-19 maka diperlukan pengaturan mengenai penyampaian usulan revisi anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang menjadi kewenangan DJPb.

Penyampaian usulan revisi anggaran yang menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan diatur sebagai berikut:

1. Penyampaian usulan revisi anggaran kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran/Kepala Kanwil DJPb dilakukan tanpa menyampaikan dokumen asli (hardcopy);
2. Pimpinan unit eselon I pemilik Program atau KPA Satker menyampaikan usulan revisi anggaran melalui aplikasi SAKTI Web — Modul Penganggaran;
3. Pimpinan unit eselon I pemilik Program atau KPA Satker wajib menatausahakan dokumen asli (hardcopy) usulan revisi anggaran yang disampaikan kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran/Kepala Kanwil DJPb;
4. Direktorat Pelaksanaan Anggaran/Kanwil DJPb mengunduh surat usulan revisi anggaran, dokumen pendukung, dan ADK RKA-K/L melalui aplikasi DJA Single Window (DSW) sebagaimana dimaksud pada angka 1;
5. Adapun pengaturan selain penyampaian dokumen asli tetap mengikuti ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2020;
6. Dalam hal terdapat usulan revisi yang tidak sesuai dengan ketentuan, Direktorat Pelaksanaan Anggaran/Kanwil DJPb dapat menerbitkan surat penolakan/pengembalian;

7. Surat Pengesahan Revisi Anggaran (SPRA) atau Surat Penolakan/Pengembalian Usulan Revisi Anggaran dapat diunduh pada aplikasi SatuDJA;
8. ADK hasil revisi dapat diunduh pada aplikasi SatuDJA atau aplikasi SAKTI.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

Para Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali.